

**Representasi keberpihakan Tempo pada golongan tertindas: Analisis wacana kritis**

**Donald Jupply\*, Yayuk Eny Rahayu, Sumarlam**

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding Author; Email: [donaldjupply@uny.ac.id](mailto:donal djupply@uny.ac.id)

---

**ABSTRAK**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) deskripsi representasi media tempo terhadap kasus TWK melalui deksripsi teks dalam tataran linguistik (2) deskripsi peran pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus TWK bagi pegawai KPK melalui interpretasi tema dan judul wacana berita TWK dan (3) deskripsi representasi keberpihakan media tempo dalam wacana berita TWK melalui interpretasi dan eksplanasi makna wacana berdasarkan unsur modalitas, metafora, dan keterlibatan actor dalam wacana berita TWK. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK). Objek penelitian ini adalah wacana berita dengan topik TWK di media Tempo. Data dikumpulkan dengan teknik simak dan cacat. Data dianalisis sesuai rumusan permasalahan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, menggunakan validitas semantis, serta reliabilitas interrater dan intrarater. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Struktur dalam teks berita ini terdiri dari empat elemen yaitu judul berita, orientasi, untaian peristiwa dan penutup. (2) penyusunan tema dan informasi dalam judul berita utama didominasi 57 anggota KPK yang tidak lolos TWK, LSM, Pakar Hukum tata negara, Komnas HAM, dan Ombudsman yang melihat TWK tidak tepat. Penggunaan modalitas dalam teks berita ini didominasi modalitas intensional sebanyak 69 tuturan (61 %). Dalam tataran diksi, penggunaan metafora juga cukup dominan, khususnya dalam diksi kalimat judul (3) Berdasarkan hasil interpretasi dan eksplanasi, Tempo menyuguhkan beberapa argumen dengan kutipan langsung dari pihak-pihak yang tidak mendukung langkah ketua KPK untuk segera memberhentikan pegawai KPK yang tidak lolos asesmen TWK.

**Kata kunci:** representasi media Tempo, wacana berita, Tes Wawasan Kebangsaan, Analisis Wacana Kritis

**Representation of Tempo's taking sides on the oppressed:  
A critical discourse analysis**

**Abstract**

This research presents a critical discourse analysis on how twelve Tempo headlines represent their taking sides with the 57 KPK employees who failed the civics test. Using the qualitative method, this study aims: 1) to describe the textual evidence of how Tempo framed the KPK civics test through its twelve headlines, 2) to describe how Tempo employs the theme structure of its twelve headlines titles that invokingly indicate its position concerning the KPK civic test, and 3) to describe how Tempo takes sides with the 57 KPK employees through modalities, metaphors, and direct quoted utterances in the news discourses. This study finds firstly that the twelve Tempo headlines were instantiated with the schematic structure of orientation, events sequence, and closing. Secondly, the theme-rheme analysis on the twelve headlines titles show that the 57 KPK employees, Indonesian Human Rights Commission, Ombudsman, Indonesian Corruption Watch (ICW), and Constitutional Law experts are foregrounded as the topical unmarked themes. Thirdly, the use of intentional modalities and metaphors and the direct quoting of arguments against the dismissal of the 57 employees voiced by Indonesian Human Rights Commission, Ombudsman, Indonesian Corruption Watch (ICW), and Constitutional Law experts show how Tempo headlines framed the KPK civic test.

**Keywords:** Civics Tests, critical discourse analysis, media representation

---

**Article history**

*Submitted:*  
4 November 2021

*Accepted:*  
16 March 2022

*Published:*  
31 March 2022

---

**Citation (APA Style):** Jupply, D., Rahayu, Y. E., Sumarlam, S. (2022). Representasi keberpihakan Tempo pada golongan tertindas: Analisis wacana kritis. *LITERA*, 21(1), 54-65. <https://doi.org/10.21831/ltr.v21i1.44981>

---

## PENDAHULUAN

Tes wawasan kebangsaan yang selanjutnya disebut dengan TWK adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pegawai KPK karena akan ada peralihan status pegawai, dari pegawai KPK secara otonom menjadi pegawai negeri sipil (ASN). Perubahan status ini didasarkan pada pasal 5 ayat (4) peraturan komisi (perkom) tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Perkom ini sendiri lahir sebagai amanat UU no 19 tahun 2019 tentang KPK dan Peraturan Pemerintah (PP) no 41 tahun 2021 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi pegawai ASN (Berita Antara News.com. 15 September 2021). Berdasarkan landasan hukum tersebut, syarat yang harus dipenuhi pegawai agar lolos dalam tes TWK adalah 1) setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah; 2) tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang dan atau putusan pengadilan; 3) memiliki integritas dan moralitas yang baik. Menurut ketua KPK Firli Bahuri, perubahan status ini tidak menyalahi aturan yang ada karena sudah sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan dasarnya. Meski demikian, kritik tetap bermunculan.

Uji TWK, bagi beberapa kalangan yang berseberangan dengan KPK dan pemerintah dipandang sebagai usaha yang terencana untuk menyingkirkan pegawai-pegawai KPK yang berprestasi dalam memberantas kasus korupsi. Salah satu pegawai yang tidak lolos ini adalah Novel Baswedan. Novel, menjadi salah satu pegawai dari 57 pegawai yang tidak lolos. Selama ini prestasi dan perjuangan Novel tidak diragukan lagi integritas dan konsistensinya dalam memberantas korupsi di semua kalangan, termasuk kalangan pejabat dengan tidak pandang bulu. Kasus ini semakin menguatkan dugaan masyarakat bahwa TWK adalah bagian dari upaya terencana dari sebagian golongan untuk menggemboskan KPK, dan membersihkan KPK dari para pegawai yang memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi.

Pada awal kemunculannya, justru memunculkan polemik yang beragam di masyarakat. Pro dan kontra hadir mewarnai pendapat masyarakat, baik dari kalangan intelektual, ahli hukum maupun para politikus yang berseberangan. Media hadir dengan sikap dan opini masing-masing dan dengan cara pandang yang beragam pula. Demikian juga dengan *Tempo* sebagai media yang telah lama dipercaya masyarakat, apakah masih konsisten menghadirkan berita-berita dengan akurasi dan netralitas yang seimbang. Konsistensi *Tempo* sebagai media yang independen patut diuji kembali dengan melihat sudut pandang dan penyajian berita dengan topik TWK. Pemilihan media *Tempo* dengan topik TWK didasarkan atas pertimbangan rasional, bahwa kasus TWK merupakan kasus besar yang sedang disoroti publik, dan *Tempo* dianggap salah satu barometer netralitas media dalam menyoroti setiap peristiwa. Oleh karenanya, topik TWK dalam *Tempo* menarik untuk dianalisis untuk menjelaskan peran dan posisi *Tempo* dalam teks wacana berita tersebut.

Sejumlah penelitian wacana media telah dilakukan untuk mencoba mengkaji representasi ideologi media dalam memandang sebuah fenomena sosial yang sedang hangat di tengah masyarakat (e.g. Fairclough 1995, Fowler et al. 1979, Fowler 1991, Hodge and Kress 1993 and van Dijk 1998). Beberapa penelitian juga mencoba fokus pada kajian netralitas atau bias media melalui analisis konten (Aswad, 2019; Shin, 2019;), perangkat diskursif media dalam merepresentasikan peristiwa dan pelibatnya melalui analisis transitivitas dan kolokasi (Dastjerdi dan Borojeni, 2014; Kania, 2019), representasi peristiwa berita utama melalui stilistik dan fitur visual (Riggs, 2021). Namun, penelitian dengan fokus keberpihakan media terhadap peristiwa mulai dari penyusunan tema dan informasi dalam judul berita, modalitas, partisipan, penekanan diksi yang bermakna metaforis belum banyak dilakukan untuk mengungkap perannya dalam menunjukkan ideologi media dalam memandang fenomena sosial yang sedang hangat di masyarakat.

Analisis kajian media *Tempo* ini merupakan analisis deskriptif dengan model pendekatan AWK. Pendekatan ini dipandang mampu mendeskripsikan hubungan antara peristiwa-peristiwa yang membangun satu kesatuan topik dan kesatuan makna wacana secara menyeluruh. Adapun fokus masalah dalam kajian ini adalah deskripsi representasi media *Tempo* terhadap kasus TWK melalui deskripsi teks dalam tataran linguistik (2) deskripsi peran pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus TWK bagi pegawai KPK melalui interpretasi tema dan judul wacana berita TWK dan (3) deskripsi representasi keberpihakan media *Tempo* dalam wacana berita TWK melalui interpretasi dan eksplanasi makna wacana berdasarkan unsur modalitas, metafora dan keterlibatan

actor dalam wacana berita TWK. Analisis wacana kritis (AWK) yang menjadi pijakan dalam kajian ini adalah analisis wacana kritis dari Fairclough (1989, 1995).

## METODE

Desain kajian ini adalah deskriptif kualitatif dengan ancangan AWK model Fairclough. Sumber datanya adalah wacana dengan topik TWK yang dimuat dalam media Tempo dari mulai kemunculan isu TWK (awal April 2021) sampai keputus MK terkait dengan gugatan perihal TWK. Metode pengumpulan data dengan simak dan catat. Yaitu menyimak berita Tempo dengan topik TWK dari awal april 2021 sampai dengan bulan agustus 2021.

Penafsiran dalam analisis data didasarkan pada tafsiran analisis wacana kritis model Fairclough (1995: 57). Adapun langkahnya adalah sebagai berikut. Analisis diawali dengan analisis teks (analisis linguistik) dengan memperhatikan diksi, semantik, kalimat dan tata tema-remas. Analisis berikutnya adalah dimensi kewacanaan untuk mengetahui bagaimana produksi teks dibuat. Analisis terakhir adalah dimensi *sociocultural practice*. Analisis pada tataran konteks sosial berupa wacana yang ada sebelum dan sesudah keputusan MK terhadap gugatan TWK dari para pegawai KPK. Secara sistematis dapat dijabarkan dalam bagan berikut.

Bagan 1. Analisis Wacana Kritis Model Fairclough



Sumber: Fairclough (1992), Eriyanto (2006), Jorgensen dan Louise (2007)

Kajian AWK dianggap sebagai penelitian yang bersifat interdisipliner, yang berorientasi pada masalah dengan memasukkan berbagai pendekatan, masing-masing dengan model, teori, metode dan agenda penelitian yang berbeda (Fairclough, Muldering dan Wodak via Sengul, 2019). Analisis wacana terkadang mengarah ke ranah sosial politik yang sangat dekat dengan masyarakat luas. Pada awalnya kajian analisis wacana hanya bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa, atau untuk apa bahasa itu dipakai (Brown 1983: 1). Wacana hanya dipandang sebagai rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal (subjek) yang disajikan secara teratur, sistematis, dalam suatu kesatuan yang koheren, yang dibentuk oleh unsur segmental maupun nonsegmental bahasa (Sobur, 2001). Namun, pada perkembangannya konsep tersebut diperluas oleh Fairclough (1989,1995), yang didukung oleh Van Dijk (1997, 2008) dan Eriyanto (2001).

Pendekatan AWK Fairclough berasumsi bahwa bahasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial, selalu berhubungan dengan unsur-unsur lain dalam kehidupan sosial, sehingga analisis wacana harus mempertimbangkan hal-hal di luar unsur kebahasaan (Sumarlam, 59). Fairclough (1992: 63) menjelaskan bahwa penggunaan wacana menunjuk pada pemakaian bahasa sebagai praktik sosial lebih daripada praktik individu sehingga menghasilkan sejumlah implikasi. Fairclough membagi wacana menjadi tiga dimensi, yaitu 1) *text*, 2) *discourse practice*, dan 3) *sociocultural practice*. *Text* dianalisis secara linguistik dengan cara melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat dan tata tema-remas. Selain itu, aspek kohesi dan koherensi yang terdapat dalam kalimat juga menjadi perhatian. Jadi, menurut Fairclough wacana memiliki tiga unsur yaitu teks, praktik sosial dan interaksi sosial. Dengan demikian, terdapat tiga tahapan dalam analisis wacana yaitu : (1) Analisis teks secara linguistik yang meliputi aspek wacana semantik dan

leksikogramatika digunakan untuk merujuk pada representasi tertentu yang ditampilkan dalam teks. (2) melihat relasi yang merujuk pada hubungan antara teks dengan interaksi yang dibangun dalam wacana misal antara penyusun teks dengan pembaca, dan (3) mendeskripsikan identitas yang merujuk pada hubungan antara interaksi sosial dan konteks sosial, sebagai konstruksi dari identitas penulis dan pembaca dan bagaimana personal dan identitas ini ditampilkan dalam sebuah wacana.

Secara sederhana, analisis wacana kritis ini dapat dijabarkan dalam dua konsep yaitu *discourse practise* dan *social practice*. *Discourse practise* merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Dalam dimensi ini, penafsiran sebuah teks didasarkan pada aspek produksi teks, penyebaran teks, dan penggunaan teks. *Sociocultural practice* merupakan analisis tingkat makro yang berhubungan dengan konteks di luar teks. Konteks dalam hal ini dapat mencakup konteks situasi yang berhubungan dengan masyarakat atau budaya dan politik tertentu. Tataran analisis pada bagian ini meliputi aspek situasional, institusional, dan sosial.

Berdasarkan konsep AWK yang dijabarkan di atas, dapat disarikan bahwa karakteristik AWK berhubungan dengan konteks dan aspek sosial. Wacana harus dipandang sebagai sebuah bentuk tindakan yang memiliki tujuan tertentu. Untuk menangkap maksud dan tujuan sebuah wacana diperlukan pemahaman konteks, karena konteks dalam AWK dipandang sebagai alat penghubung antar teks dan konteks sosial. Sebagai jembatannya adalah faktor situasi, konteks sosial dan konteks linguistik yang bersifat intertekstualitas. Intertekstualitas ini yang disejajarkan dengan historis, di mana konteks historis penting dalam AWK karena dalam pemaknaan teks wacana tidak dapat dimengerti secara lengkap tanpa menyertakan teks yang mengelilinginya. Adapun ciri pembeda dalam AWK adalah munculnya aspek kekuasaan dan konsep termarginalkan, wacana muncul dipengaruhi oleh representasi bentuk kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Wacana muncul karena ada maksud ideologi yang ingin disampaikan baik secara langsung maupun secara tersembunyi.

Dengan demikian, fokus kajian AWK adalah ideologi yang ingin disampaikan dalam memproduksi wacana atau dalam penggunaan bahasa. Secara sistematis, fokus analisis dalam AWK ini akan dimulai dari analisis teks, yaitu berkaitan dengan deskripsi teks secara semantik dan gramatikal. Selanjutnya, memasukkan unsur konteks untuk memahami hubungan antara teks bahasa dengan makna yang ada dalam wacana. Hal ini juga berperan dalam menjelaskan praktek-praktek sosial dalam wacana yang dihubungkan dengan interpretasi teks dan konteks yang membangun wacana.

## PEMBAHASAN

Berikut akan disajikan analisis teks berita TWK yang menimbulkan kontroversial di masyarakat, antara kubu KPK dengan pegawai KPK yang tidak lolos tes asesmen TWK. Pendeskripsian juga akan melibatkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam wacana tersebut. Paparan akan diawali dengan deskripsi representasi media tempo terhadap kasus TWK melalui deksripsi teks dalam tataran linguistic dengan fokus analisis struktur berita dan tema berita, Analisis dilanjutkan dengan deskripsi peran pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus TWK bagi pegawai KPK melalui interpretasi tema dan judul wacana berita TWK. Berdasarkan hasil analisis tema rema yang muncul dalam wacana berita, selanjutnya dijadikan pijakan untuk melihat keberpihakan media Tempo dalam memndang kasus TWK. Untuk memperkuat deskripsi cara pandang Tempo dalam kasus TWK, analisis dilanjutkan pada interpretasi dan eksplanasi makna wacana berdasarkan unsur modalitas, metafora dan keterlibatan actor dalam wacana berita TWK. Dengan demikian, representasi keberpihakan Tempo dalam memandang kasus TWK dapat terdeskripsi dengan lengkap. Secara sederhana alus penjabarannya meliputi deskripsi struktur teks, tema-remas yang muncul dalam judul berita tersebut, sistem gramatika yang membangun teks dan dilanjutkan dengan interpretasi dan penjelasan terkait dengan representasi media Tempo dalam sajian berita TWK melalui analisis produksi berita teks analisis tataran makro untuk memahami peran dan posisi media Tempo dalam memndang kasus TWK.

### Analisis tataran linguistik

#### *Dekripsi struktur teks berita TWK dalam media Tempo*

Struktur berita secara umum terdiri dari judul, pembukaan, isi dan penutup. Judul berita utama *Tempo* terkait TWK telah ditata dengan prinsip tema-remas dan penyusunan informasi yang

menunjukkan posisinya. Pembukaan bukan sekedar bagian pengantar untuk membawa pembaca dalam topik sajian, kemudian dilanjutkan dengan inti pembicaraan, yang berisi uraian dan penjelasan perihal topik yang disajikan, dan diakhiri dengan penutup. Struktur retorika ini dibangun oleh Tempo secara sistematis untuk membangun satu kesatuan ide atau maksud yang ingin disampaikan penulisnya. Dalam teks wacana berita TWK di media *Tempo* ini terbagi dalam 4 unsur yaitu judul, orientasi, untaian peristiwa dan bagian penutup. Komponen struktur teks berita ini akan disajikan dalam uraian berikut.

*Tempo* menjadikan judul tidak hanya berfungsi sebagai label untuk mengantarkan pembaca pada sebuah topik sajian, tetapi juga menjadi representasi media dalam menyampaikan posisinya dalam memandang fenomena sosial yang sedang diberitakan. Ini dilakukan dengan penataan tema rema dari judul beritanya. Pemilihan partisipan tertentu sebagai tema judul bukan hanya sebagai tema makro dari sebuah berita, melainkan juga menunjukkan keberpihakan Tempo terhadap pelibat peristiwa yang disampaikan secara tersirat. Jadi, judul menjadi bagian penting sebagai representasi ideologi media untuk memposisikan dirinya memandang fenomena sosial yang sedang diberitakan. Representasi kalimat judul dalam media tempo dengan topik berita TWK diwarnai dengan kehadiran “pelibat”, pelibat di sini meliputi anggota KPK yang tidak lolos TWK, pimpinan KPK, tokoh, pakar atau ahli hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga negara.

Berdasarkan analisis penyusunan tema-remas dan informasi 12 judul berita utama terkait TWK, Tempo menggunakan tiga pola topikal tak bermakna. Pola pertama yang dominan dengan enam Judul (50%) adalah dengan menjadikan 57 Anggota KPK tak lolos KPK sebagai titik tolak keberangkatan informasi. Pola kedua adalah dengan menjadikan pihak-pihak yang pro 57 Anggota KPK yang tak lolos TWK seperti pakar, ICW, Ombudsman, Komnas HAM sebagai titik keberangkatan informasi dalam judul, sebanyak empat judul (33%). Pola ketiga adalah dengan menjadikan pihak pemerintah sebagai lembaga terkait yang menjadi tumpuan akhir kepastian nasib dari 57 anggota KPK yang tak lolos TWK. Dengan judul berita utama *Jokowi Didesak Respons Temuan Ombudsman Soal TWK KPK*, Tempo kesannya mencoba tidak hanya fokus pada anggota KPK yang tak lolos TWK dan pihak-pihak yang pro anggota KPK. Tetapi dengan melihat rema dari judul tersebut, pemerintah yaitu kepala negara diposisikan sebagai pihak yang ditekan. Ini mengindikasikan bahwa Tempo tetap berpihak pada kelompok yang termarginalkan walaupun tema topikal beritanya tidak lagi fokus pada 57 anggota KPK yang tidak lolos TWK. Berikut adalah contoh penyusunan tema-remas judul berita utama Tempo terkait TWK.

(1) *57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK* Surat Jokowi, Minta Segera Diangkat Jadi ASN

(2) “*Pakar* : putusan MK soal TWK tak benarkan tindakan inskonstitusional petinggi KPK”

Dalam kalimat judul di atas, penggunaan tema topikal judul dengan diksi *57 Pegawai KPK Tak Lolos* dan *Pakar*, sebagai titik keberangkatan judul berita untuk menarik minat pembaca, bermuatan penggiringan opini yang memfokuskan berita pada pihak yang termarginalkan dan pihak yang pro termarginalkan. Pemilihan diksi tema topikal dengan tanpa penyebutan pakar tertentu seolah-olah pernyataan di judul merujuk pada sejumlah pakar atau bahkan mewakili semua pakar. Simpulan ini didasarkan pemilihan diksi pelibat yang tidak tentu terkait penutur yang langsung memberikan pendapat soal tindakan KPK dengan sebutan “pakar”. Selain itu, pakar yang identik dengan ahli dianggap mewakili suara masyarakat dari kalangan terdidik yang memahami persoalan dengan baik. Pakar di sini juga merujuk pada kumpulan orang. Selain itu, kehadiran institusi MA dalam kalimat judul, Komnas Ham, dan sebagainya sebagai tema topikal tak bermakna tentu sarat dengan maksud yang menguatkan keberpihakan Tempo terhadap yang termarginalkan dengan penggiringan opini.

Dengan pola penyusunan tiga pola tema-remas judul, *Tempo* mencoba membangun dan menguatkan keberpihakannya terhadap 57 anggota KPK tak lolos TWK, sehingga kesannya tindakan KPK dianggap inskonstitusional, jika melakukan tindakan pemecatan terhadap pegawai KPK. Dengan kata lain, Tempo telah mengindikasikan posisinya yang berada pada pihak yang termarginalkan dimulai dari pemilihan tema topikal tak bermakna pada judul berita utamanya yang dominan merujuk pada pelibat 57 anggota KPK dan pihak-pihak yang pro. Posisi keberpihakan ini semakin diperkuat melalui perangkat linguistik lainnya di struktur teks berita berikutnya.

Unsur kedua adalah orientasi, di mana bagian ini mengantarkan pembaca pada isi pembicaraan dalam teks berita tersebut. Adapun inti dari teks berita ini adalah konflik yang terjadi dalam tubuh

KPK oleh adanya uji asesment TWK bagi pegawai KPK (Berikan data). Teks beritanya secara keseluruhan menjelaskan ketidaksetujuan para pegawai KPK yang tidak lolos tes uji asesment TWK. *Tempo* mencoba menghadirkan pakar, intitusi dan opini masyarakat yang secara tidak langsung menggiring dukungan terhadap 57 pegawai KPK yang tidak lolos uji ini dan menghendaki peninjauan kembali terhadap alat ukur aeesmen TWK tersebut.

Unsur ketiga adalah untaian peristiwa. Unsur ini adalah menjadi bagian penting dalam teks berita. Unsur ini berisi deskripsi peristiwa secara jelas dan lengkap terkait dengan peristiwa uji asesment TWK dalam tubuh KPK. Komponen berita 5 W dan 1 H, hadir dalam bagian ini, di mana, kapan, apa, mengapa dan bagaimana peristiwa ini terjadi dihadirkan dalam bagian ini. Bahkan, sajiannya dilengkapi dengan sumber-sumber pendukung, baik berupa pendapat, kutipan langsung, kutipan tidak langsung atau hasil wawancara dengan pakar atau tokoh yang memahami konteks peristiwa TWK. Kehadiran tokoh atau pakar hukum dan tata negara, pendapat institusi tentu akan berimplikasi terhadap penguatan argumen yang dihadirkan tempo dalam sajian beritanya.

Unsur keempat adalah penutup. Dalam teks berita TWK ini di bagian penutup sebagian besar diakhiri dengan deskripsi dari ahli untuk mendukung. Jadi pendapat ahli juga muncul di bagian akhir untuk menguatkan sajian topik dan pemahaman terhadap alur teks berita. Misal pada kutipan kalimat berikut.

(3) “MA menyatakan tindak lanjut asesment tersebut merupakan wewenang pemerintah”

Data (3) tersebut adalah kalimat penutup yang muncul dalam TWK yang berjudul “Gugatan ditolak MA, pegawai KPK berharap segera ada keputusan Jokowi soal TWK”. Apabila dihubungkan antara kalimat judul dengan kalimat penutup tersebut, jelas memiliki hubungan koherensi yang saling mendukung. Dalam kalimat judul disebutkan bahwa pegawai KPK berharap terhadap keputusan Jokowi selaku pemerintah, sedangkan kalimat penutup disajikan keputusan MA yang menyebutkan bahwa tindak lanjut masalah ini ada pada wewenang pemerintah.

#### ***Deskripsi tema teks berita TWK dalam media tempo***

Berdasarkan penelusuran media internet, ditemukan 12 teks berita yang bertema TWK dalam media tempo online. Penulusuran dibatasi pada pemberitaan setelah uji asesment TWK dan proses menuju keputusan pegawai KPK yang tidak lolos uji asesment. Secara kronologis akan disajikan sesuai urutan kemunculan judul berita sebagai berikut.

1. Jokowi Didesak Respons Temuan Ombudsman Soal TWK KPK (7 Agustus 2021)
2. Banjir Kritik KPK dalam Perkara TWK (7 Agustus 2021)
3. 3 Jejak Perlawanan Pimpinan KPK dalam Perkara TWK (7 Agustus 2021)
4. Komnas HAM Duga Penyingkiran Pegawai KPK Lewat TWK Terencana (24 Agustus 2021)
5. 57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Surati Jokowi, Minta Segera Diangkat Jadi ASN (24 Agustus 2021)
6. Soal TWK Pegawai KPK, Stafsus Jokowi: Presiden Tunggu Putusan MK dan MA
7. Sosok Pegawai KPK yang Tersingkir Karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan (26 Agustus 2021)
8. Bongkar Kasus Korupsi, Para Penyidik KPK Ini Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan (29 Agustus 2021)
9. Pakar: Putusan MK Soal TWK Tak Benarkan Tindakan Inkonstitusional Petinggi KPK (7 September 2021)
10. Mahkamah Agung Tolak Uji Materiil Pegawai KPK Soal TWK (9 September 2021)
11. Pegawai KPK Tunggu Respons Presiden soal TWK, Jubir Jokowi: Belum Ada Tanggapan (10 Septembsr 2021)
12. Gugatan Ditolak MA, Pegawai KPK Berharap Segera Ada Keputusan Jokowi Soal TWK

#### ***Analisis gramatika teks berita***

Analisis gramatika pada teks berita ini difokuskan pada modalitas dan pemanfaatan metafora dalam teks berita TWK di media Tempo.

#### ***Modalitas***

Modalitas adalah alat yang dipakai pembicara untuk memberikan gambaran terhadap sikapnya, yang berhubungan dengan apa yang dituturkannya dan bagaimana menuturkannya (Lyons

1977). Konsep ini diperjelas oleh Syamsuri (1990) bahwa modalitas adalah unsur-unsur yang menyatakan sikap pemakai bahasa baik terhadap apa yang dinyatakan maupun terhadap pandangannya. Lebih lanjut dijelaskan Sumarlam (2018 :63)), bahwa modalitas mengacu pada sikap suka, tidak suka, menolak atau menerima, setuju atau tidak setuju yang mengandung ideologi atau gagasan dari penutur. Termasuk di dalamnya sikap netral atau tidak berpihak.

Menurut Von Wright (via Abdurahman) membagi subkategori modalitas menjadi empat, yaitu modalitas elektik (yang berhubungan dengan kebenaran), modalitas epistemik (yang berhubungan dengan pengetahuan atau apa yang diketahui, (3) modalitas deontik (yang berhubungan dengan kewajiban dan modalitas eksistensial (yang berhubungan dengan keberadaan. Namun, Von Wright menambahkan lagi tentang modalitas dinamik yaitu modalitas yang berhubungan dengan kemampuan. Konsep Modalitas ini juga dikemukakan oleh Alvi (1990) dalam 4 subkategori, yaitu modalitas intensional (yang berhubungan dengan keinginan), modalitas epistemik (yang berhubungan dengan pengetahuan), modalitas deontik dan modalitas dinamik. Dalam melihat teks berita TWK ini akan diimplementasikan kedua konsep modalitas tersebut. Adapun implementasinya akan disajikan sebagai berikut.

### ***Modalitas elektik***

Modalitas ini berhubungan dengan kebenaran, menghadirkan fakta-fakta untuk mendukung kebenaran. Modalitas ini berhubungan dengan hadirnya fakta dalam teks sebagai pendukung argumentasi maksud yang hendak disampaikan media Tempo kepada pembaca. Adapun implementasi dari modalitas ini seperti dalam contoh berikut.

1. Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana mencatat pembangkangan yang terakhir ini telah melengkapi pengabaian yang dilakukan oleh pimpinan lembaga antirasuah itu soal alih status pegawai. ICW mencatat ada tiga '**pembangkangan**' yang dilakukan, yaitu **terhadap pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi, arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan terakhir tindakan korektif Ombudsman.**
2. Novel Baswedan  
Nama yang sudah tak asing dalam operasi penangkapan kasus suap dan OTT. Ia bahkan menjadi titik tembak serangan balik para koruptor di negeri ini. Novel harus menjalani perawatan di rumah sakit di Singapura setelah disiram air keras. Kedua matanya terluka dan rusak permanen hingga kini. Namanya sudah menjadi target sasaran sejak 10 tahun lalu, tepatnya pada Jumat, 5 Oktober 2012 sejumlah polisi datang ke kantor KPK hendak menangkapnya. Ini merupakan buntut dari pengungkapan dan penggeledahan Kantor Korps Lalu Lintas Polri pada Juli 2012. Novel merupakan salah satu dari 28 penyidik yang beralih status menjadi pegawai KPK dan mundur dari Korps Kepolisian pada tahun itu. (**Informasi terkait nama dan identitas mendukung aspek kebenaran deskripsinya.**)

### ***Modalitas intensional***

Modalitas ini berhubungan dengan keinginan, ajakan, harapan dan permintaan. Penggunaan modalitas ini mengimplikasikan keinginan dan permintaan penulis (media Tempo) dalam menyampaikan maksudnya yang berupa permintaan atau ajakan. Adapun implementasinya seperti dalam contoh berikut.

1. **Presiden diharapkan** tidak hanya diam karena ada beberapa hal atau saran perbaikan yang bisa dilakukan presiden sebagai atasan terlapor (KPK),"
2. **Mereka meminta untuk** segera diangkat menjadi ASN.
3. Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo **berharap** Presiden Joko Widodo atau Jokowi mau mengambil alih proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara.

### ***Modalitas epitemik***

Modalitas epistemik adalah modalitas yang berhubungan dengan faktor kemungkinan, keteramalan, dugaan, penyimpulan dan sebuah kepastian. Modalitas ini berhubungan dengan deskripsi kemungkinan dan dugaan-dugaan yang muncul dalam peristiwa kasus TWK. Simpulan dan

dugaan ini dihadirkan dalam wacana untuk memperkuat argumen Tempo dalam usahanya menggiring pembaca agar mengikuti pola pikir dan argumennya. Adapun Implementasinya seperti dalam contoh berikut.

1. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam **menduga** bahwa penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berujung penyingkiran pegawai KPK dilakukan secara terencana
2. Komnas Ham telah **menyimpulkan** ada nuansa pelaksanaan undang undang diluar kepentingan pelaksanaan undang undang itu sendiri atau bisa disebut sebagai penyingkiran pegawai KPK.

### **Modalitas deontik**

Modalitas yang berhubungan dengan tindakan pemberian izin atau perintah, misalnya dengan pengungkapan kata diperkenankan, diizinkan, diharuskan, hendaknya, desakan, seharusnya, sepatutnya dan sebagainya. Modalitas ini berhubungan dengan deskripsi tempo dalam menyajikan teks berita yang berhubungan dengan sajian pendapat ahli, atau pejabat pemerintah. Adapun Implementasinya seperti dalam contoh berikut.

1. Presiden Joko Widodo atau Jokowi **didesak** merespons Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI yang memuat temuan maladministrasi pada proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN.
2. Alhasil, menurut Hotman, **sudah sepatutnya** semua ke-57 pegawai diangkat menjadi ASN.
3. Menyikapi situasi dan sikap pimpinan KPK, maka **sepatutnya** Bapak Presiden (Jokowi) dapat melakukan koreksi dan pembinaan terhadap lembaga di bawahnya," ujar Rasamala dalam diskusi daring, Jumat, 6 Agustus 2021

### **Pemanfaatan metafora dalam diksi teks berita TWK**

Diksi dalam teks berita menjadi salah satu parameter sudut pandang media dalam mengungkap realitas berita. Dalam teks berita TWK ini banyak memanfaatkan bentuk-bentuk metafora dalam pilihan katanya. Bentuk metafora ini hadir untuk tujuan menyamakan makna atau justru mempertegas makna dalam teks berita tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Chaer bahwa penggunaan metafora adalah untuk mencapai efek pembicaraan yang lebih tegas (Chaer 2012: 315). Atau Metafora juga merupakan pemakaian kata atau kelompok kata dengan makna yang tidak sebenarnya (Zamzani dkk, 2019). Metafora hadir untuk membangun nilai ekspresif yang mendalam. Nilai ekspresif ini dihubungkan dengan subjek dan realitas yang ada dan untuk mengungkapkan sebuah identitas sosial secara tersamar (Zamzani, 2019). Di samping aspek modalitas yang telah dijabarkan di atas, penggunaan metafora juga mampu membangun idiologi yang ingin di sampaikan media. Diksi yang memiliki satu kesatuan makna dalam kalimat sangat berpengaruh dalam membangun makna dalam sebuah paragraf maupun wacana. Peranan diksi yang bermakna metaforis ini tentu sarat dengan makna. Metafora adalah bahasa dalam arti yang tidak sebenarnya, melainkan berupa kiasan yang bisa mengacu pada persamaan atau perbandingan sifat yang dimiliki objek tersebut, tetapi bukan makna yang sebenarnya. Bentuk metafora bisa mempunyai nilai rasa negatif (lebih kasar dari diksi lainnya adalah salah satu alternatif yang sengaja digunakan wartawan agar memperoleh efek tertentu (Ristanto,2019:171). Dalam teks ini ditemukan bentuk-bentuk metafora untuk mencapai efek yang tegas, memperhalus maksud, atau mempertegas maksud.

Adapun bentuk-bentuk metafora yang muncul antara lain *cacat prosedural*, *cacat hukum*, *penyingkiran*, *maladministrasi*, *banjir kritik*, *inskonstitusional*, *kealpaan*, dan bentuk-bentuk lain. Bentuk ini muncul untuk menggantikan kata-kata tertentu agar memberi kesan tegas pada maksud tuturan. Frase *banjir kritik* misalnya, menggantikan frase banyak kritik. Apabila menggunakan kata banyak, maka nilai rasanya terkesan biasa saja. Bentuk frase *cacat prosedural*, *cacat hukum*, memiliki makna “*kesalahan*” artinya ada kesalahan prosedur, dan kesalahan secara hukum. Dengan memanfaatkan kata “*cacat*” untuk menggantikan kata “*kesalahan*”, konotasi yang ditimbulkan dari dua makna kata itu menjadi berbeda. Kata kesalahan memiliki konotasi biasa, sementara kata cacat memiliki konotasi negatif dan menyangatkan.

Berdasarkan analisis teks berita, pada tataran modalitas dan eufimisme yang ditunjukkan pada kutipan-kutipan di atas menjadi bukti secara tekstual untuk melihat sudut pandang media Tempo dalam menyajikan beritanya. Pemanfaatan modalitas juga memberikan implikasi akan sikap media

terhadap produksi berita. Pemanfaatan modalitas intesional memiliki posisi tertinggi yaitu sebesar 61 % (30 tuturan). Pemanfaatan modalitas intensional yang memberikan implikasi terhadap harapan, permintaan dan keinginan adalah representasi media *Tempo* dalam mewakili suara pegawai KPK yang sedang dalam kasus perpindahan status dari pegawai KPK menjadi ASN melalui uji asesmen TWK.

### **Interpretasi produksi teks berita**

Produksi berita dalam surat kabar berhubungan dengan latar belakang penulisnya, latar belakang media, atau latar belakang aktor/pelaku yang terlibat dalam wacana tersebut (Zamzani, dkk.2019: 60). Dalam teks wacana TWK ini produksi teks beritanya berhubungan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam teks berita tersebut (aktor/pelaku yang terlibat dalam teks). Dari 12 teks yang dijadikan sumber data dalam teks TWK ini ditemukan 8 pihak-pihak yang terlibat dalam teks ini. Masing-masing pihak berkontribusi dalam membangun makna dan maksud wacana. Adapun pihak-pihak tersebut adalah Komnas Ham, MA, MK, KPK (ketua KPK dan juru bicaranya, pegawai KPK yang tidak lolos TWK), ombusman, Menteri PAN RB, kepala BKN, Presiden Jokowi dan LMS. Kehadiran aktor sosial atau pihak-pihak yang terlibat dalam wacana mampu membentuk wacana, peran dan identitas dar aktor sosial tersebut (Van Leeuvan dan Wodak 1999 via Machin, Andrea Mayr, 2014). Dengan wacana mewakili pengetahuan tentang apa yang terjadi dalam praktik sosia tertentu, siapa yang terlibat di dalamnya dan nilai-nilai apa yang dipegang dan hendak disampaikan.

*Tempo*, sengaja menghadirkan pihak-pihak luar sebagai aktor sosial ini untuk mendukung posisi media *Tempo* dalam menyuarakan aspirasi para pegawai KPK yang tidak lolos TWK. *Tempo* berusaha menjabarkan apakah tindakan yang dilakukan oleh ketua KPK terhadap pegawai KPK yang tidak lolos uji TWK sudah memenuhi syarat secara administratif maupun secara hukum. Kutipan-kutipan langsung yang muncul dari pernyataan pihak-pihak ini menjadi dasar pendirian *Tempo* dalam merepresentasikan posisi *Tempo* dalam memandang kasus KPK dalam tes asesmen TWK.

Berikut akan disajikan kutipan-kutipan langsung sebagai bentuk representasi *Tempo* dalam pemberitaan kasus KPK dalam teks asesmen TWK.

1. *"Para pemohon tidak dapat diangkat menjadi ASN bukan karena berlakunya perkom 1 2021 yang dmohonkan pengujian, namum karena hasil asesmen TWK. Pemohon sendiri yang TMS sedangkan tindak lanjut dari hasil TWK tersebut menjadi kewenangan pemerintah," kata dia. (pernyataan dari MA terkait uji materiial TWK soal KPK, dan memberikan pernyataan bahwa tindak lanjut dari tes ini adalah wewenag pemerintah)*
2. *"Hasil tes wawasan kebangsaan hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu atau institusi KPK dan tidak serta-merta menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes," kata Jokowi dalam video yang disiarkan Sekretariat Presiden, Senin, 17 Mei 2021.*
3. *"Maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun, di luar desain yang telah ditentukan tersebut," kata hakim konstitusi Enny Nurbaningsih di sidang uji materi UU KPK, Selasa, 4 Mei 2021.*

Berdasarkan 3 kutipan langsung dari lembaga tinggi MA, MK dan dari Presiden Jokowi, memberikan isyarat bahwa penghentian pegawai KPK yang tidak lolos uji asesmen TWK perlu dikaji kembali atau harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum yang benar. Berdasarkan asumsi tersebut, terdapat kecenderungan Media *Tempo* memposisikan diri sebagai "pembela" atau penyambung aspirasi suara pegawai KPK yang tidak lolos asesment TWK. Hal ini merupakan bentuk dukungan tidak langsung dari Media *Tempo* terhadap kelangsungan nasib pegawai KPK yang tidak lolos uji asesmen TWK.

### **Interpretasi dan eksplanasi pada tataran makro untuk memahami posisi media *Tempo* dalam kasus TWK**

Tahap selanjutnya adalah tahap interpretasi teks secara makro yang dihubungkan dengan faktor konteks situasi dan sosialnya. Interpretasi ini bertujuan untuk mengungkapkan peran dan posisi Media *Tempo* dalam memandang sebuah peristiwa TWK dalam kaca mata dan sudut pandang *Tempo*. Penafsirannya akan dimulai dari empat dimensi yaitu apa yang diberitakan dalam teks berita

tersebut, siapa yang terlibat dalam wacana teks tersebut, apa hubungannya dengan isu yang diangkat dan apa peran bahasa dalam teks ini. Empat dimensi ini akan dihubungkan dengan peran dan posisi media dalam pemberitaannya. Adapun hasil interpretasinya dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Peristiwa yang terjadi dalam teks ini adalah kasus yang sangat menarik, berkaitan dengan lembaga negara yang mengurus kasus-kasus korupsi, dan kerap menjadi sorotan media. Sejak resmi berdiri pada tanggal 29 Desember 2003, banyak hal yang berhubungan dengan lembaga yang menarik untuk dikupas, baik terkait dengan kinerjanya maupun tentang kondisi internal lembaganya.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam isu pemberitaan ini adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kekuasaan terhadap lembaga KPK. Pihak-pihak tersebut adalah KPK sendiri yang mejadi objek pembicaraan (dengan dua kubu yang berbeda, kubu KPK dengan ketua KPK dan jajarannya serta pegawai KPK yang tidak lolos uji asesmen TWK, lembaga tinggi negara dalam bidang hukum yaitu MA dan MK, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo, LMS, Ombusmen, Komnas Ham, Menteri PAN RB, Pakar dan kepala BKN. Kehadiran LMS, Ombusmen, Komnas Ham dan Pakar hukum ini memberikan citra positif bagi media tempo, bahwa media ini konsisten dalam melakukan pembelaan terhadap kaum tertindas atau termarginalkan. Sajian opini dan kutipan langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam tuturan ini menggiring opini bahwa *Tempo* masih mampu menyuarakan suara kaum termarginalkan. Hal ini dapat dicermati dalam sajian data berikut.
  - a. *"Sehingga putusan MK sama sekali tidak mengenyampingkan temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM," kata para peneliti Themis dalam keterangan tertulis mereka, Selasa, 7 September 2021.*
  - b. *"Meskipun TWK adalah kewenangan KPK namun dalam hukum administrasi negara jika kewenangan tersebut dilakukan dengan prosedur yang salah maka hasilnya harus dianggap batal demi hukum," kata mereka. (dari tim peneliti dan pakar hukum)*
  - c. *"Per kasus kita temukan memang peristiwa ini terencana. Misalnya, mengubah alih status menjadi selektif, memilih bekerja sama dengan BKN yang tak punya instrumen, dasar untuk pelaksanaan teknis belum ada dasar hukumnya. Banyak lubang-lubang koridornya yang tidak sesuai dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik," kata Anam dalam live instagram @tempodotco, Selasa 24 Agustus 2021.*

Tiga kutipan langsung yang muncul dalam teks berita tersebut adalah pernyataan-pernyataan dari sumber yang memiliki kredibilitas yang sesuai dalam menanggapi kasus TWK ini. Pendapat-pendapat ini dihadirkan adalah bagian dari representasi *Tempo* dalam usahanya membantu kaum termarginalkan (dalam hal ini pegawai KPK yang tidak lolos uji asesmen). Komnas Ham dan pakar hukum dipandang cukup objektif dan memiliki kapabilitas dalam memandang dan menilai kasus ini. Kehadiran aktorsosial dalam wacana memberikan peran yang berarti dalam merepresentasikan makna wacana. Kehadiran aktor sosial sebagai sarana visualisasi ide gagasan dari media untuk mempengaruhi pembaca. Sebagaimana dalam artikel Ashley Riggs, (2021) bahwa siapa dengan gagasan apa yang ditampilkan dalam media massa adalah sarana visualisasi objek dan gagasan bagi penulisnya.

1. Hubungan antara media dengan pemberitaan yang ada. Media *Tempo* memberikan perannya sebagai media informasi, sudah sewajarnya mengakat isu-isu menarik dan mejadi sorotan secara nasional, bahkan internasional. Di antara pemberitaan yang menarik dan kontroversial adalah usaha ketua KPK untuk memberhentikan pegawai KPK yang tidak lolos asesmen TWK dalam batas kurun waktu tertentu, padahal belum ada keputusan Presiden sebagai pimpinan negara yang berwenang melakukan tindakan.
2. Dimensi yang terakhir yang terkait dengan interpretasi dan eksplanasi ini adalah peran bahasa dalam penggunaannya. Dalam teks ini penggunaan bahasa, baik tataran diksi maupun struktural kalimatnya sangat menentukan cara pandang pembacanya. Dalam konteks teks TWK ini pembaca disuguhi argumen-argumen yang memberikan pandangan dan wawasan bagi pembaca terkait dengan sikap KPK. *Tempo* menyuguhkan beberapa argumen dengan kutipan langsung dari pihak-pihak yang tidak mendukung langkah ketua KPK untuk segera memberhentikan pegawai KPK yang tidak lolos asesmen TWK. Dengan kutipan-kutipan langsung dari Komnas

Ham, Ombusman, dan para pakar hukum diharapkan mampu menggiring opini pembaca untuk berempati dan memberikan dukungan pada pegawai KPK yang tidak lolos tes assesmen. Setidaknya, membangun opini publik bahwa pemberhentian dengan cepat dengan alasan tidak lolos uji asesmen TWK tidak layak dilakukan. Bila menilik pada integritas dan kinerja mereka di lembaga antiruwah tersebut pemberhentian secara mendadak ini menjadi cacatan buruk untuk administrasi KPK. Dalam teks ini juga ditunjukkan dengan dihadapkannya daftar nama-nama pegawai KPK yang memiliki integritas dan kinerja bagus dalam pemberantasan korupsi. Nama-Nama tersebut antara lain Novel Baswedan, Harun Al Rasyid, Andre Nanggolan dan lain-lain. Nama-nama ini disajikan khusus dalam teks berita Tempo dengan judul “Bongkar kasus korupsi, para penyidik KPK ini tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan”.

Kalimat judul ini bermakna negasi, ada klausa positif dan negatif yang langsung disandingkan secara berurutan. Hal ini merepresentasikan makna yang berlawanan.

Berdasarkan uraian di atas, ditemukan peran dan posisi Media *Tempo* dalam uji asesmen TWK untuk pegawai KPK. Dari hasil analisis secara tekstual, latar belakang produksi teks, interpretasi dan eksplanasinya kajian ini menghasilkan simpulan sebagai berikut.

1. Struktur dalam teks berita ini terdiri atas empat elemen yaitu judul berita, orientasi, untaian peristiwa dan penutup.
2. Penggunaan modalitas dalam teks berita ini didominasi oleh modalitas intensional. Modalitas intensional memiliki posisi tertinggi yaitu sebesar 61 % (30 tuturan), hal ini merepresentasikan keinginan, permintaan dan harapan dari *Tempo* kepada masyarakat dan pemerintah untuk mengkaji ulang dan memperhatikan nasib 57 para pegawai KPK yang akan diberhentikan karena tidak lolos uji asesmen TWK. Pemanfaatan modalitas intensional ini merupakan representasi media *Tempo* dalam mewakili suara pegawai KPK yang yang tidak lolos uji asesmen TWK. Bentuk-bentuk metofora cukup dominan muncul dalam diksi judul berita maupun dalam isi teks berita.
3. Interpretasi terhadap teks-teks ini dilakukan secara intertekstual agar memperoleh pemahaman makna dan maksud secara lengkap.
4. Berdasarkan hasil interpretasi dan eksplanasi dari sisi kebahasaan merepresentasikan cara pandang Media *Tempo* kasus uji TWK untuk pegawai KPK. *Tempo* menyuguhkan beberapa argumen dengan kutipan langsung dari pihak-pihak yang tidak mendukung langkah ketua KPK untuk segera memberhentikan pegawai KPK yang tidak lolos asesmen TWK. Dengan kutipan-kutipan langsung dari Komnas Ham, Ombusman, dan para pakar hukum diharapkan mampu menggiring opini pembaca untuk berempati dan memberikan dukungan pada pegawai KPK yang tidak lolos tes assesmen. Kehadiran lembaga atau pakar hukum ini menguatkan opini *Tempo* dalam usahanya membela kaum yang termarginalkan yaitu 57 pegawai KPK yang tidak lolos uji asesmen TWK. Peran aktor-aktor sosial yang dimunculkan membantu memvisualisasikan gagasan dan keinginan *Tempo* dalam memandang kasus TWK.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memfasilitasi terselesaikannya artikel penelitian ini. Tak lupa terimakasih kami haturkan pula kepada tim diskusi dalam bidang kajian ilmu serumpun dan rekan sejawat. Semoga artikel ini dapat menambah khasanah penelitian yang berkaitan dengan analisis wacana kritis dalam Media.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, H. (1990). *Modalitas dalam bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Aswad, N.G. (2019). Biased neutrality: The symbolic construction of the Syrian refugee in the New York Times, *Critical Studies in Media Communication*, DOI: 10.1080/15295036.2019.1628996
- Burhanuddin, S. Hasil telaah disertasi Fransisca Dwi Harhanti “*Penggunaan bahasa dalam perepresentasian kekuasaan di Media Cetak*” Perspektif Studi Analisis Wacana kritis.

- David, M. & Myar, A. (2014.) Personalising crime and crime fighting in factual television: An Analysis of sosial actors and transitivity in language and image. *Critical Discourse Studies*. DOI: 10.1080/22041451.2019.1695082.
- Dastjerdi, H.V. & Borojeni, F.A. (2014). A CDA representation of the May 31, 2010, Gaza-bound Aid Flotilla raid portrayal of the events and actors. *Pragmatics and Society* 5:1, 1–21. doi 10.1075/ps.5.1.01das
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana (Pengantar Analisis Teks Media)*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Fairclough, N. (1992). *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press.
- Fairclough, N. (1995). *Media Discourse*. London: Longman.
- Kania, U. (2019). Marriage for all ('Ehe Fuer Alle')?! A corpus-assisted discourse analysis of the marriage equality debate in Germany. *Critical Discourse Studies*, DOI:10.1080/17405904.2019.1656656.
- Lyons, J. (1977). *Semantic*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Riggs, A. (2021). How online news headlines and accompanying images 'translate' a violent event: A cross-cultural case study. *Language and Intercultural Communication*, DOI: 10.1080/14708477.2020.1870486.
- Ristanto, B. (2019). *Efek penggunaan difemia dalam teks media*. <https://journal2.ac.id/index.php/basindo>.
- Senggul, K. (2019). Critical discourse analysis in political communication research: A case study of right wing populist discourse in Australia. *Communication Research and Practice*. DOI: 10.1080/17405904.2013.813771.
- Shin, Jaran. (2019). The vortex of multiculturalism in South Korea: A Critical discourse analysis of the characterization of "multicultural children" in three newspapers. *Communication and Critical/Cultural Studies*. 16:1, 61-81, DOI: 10.1080/14791420.2019.1590612.
- Sumarlam. Representasi kekuasaan melalui sabda raja pada teks berita mengenai konflik internal Keraton Yogyakarta (sebuah analisis wacana kritis). Makalah disajikan dalam *Seminar Internasional Prasasti III: Current Reseach in Linguistics*.
- Syamsuri. (1990). *Analisis Bahasa*. Jakarta: Airlangga.
- Sobur, A. (2004). *Analisis Teks Media*. Bandung: Rosda Karya.
- Van, L.T. & Wodak, R. (1999). Legitimizing imigration control: A discourse-historical analysis. *discourse and society* 1 (1) 83-118. DOI:10.1177/1461445699001001005.
- Zamzani, Rahayu, Y.E., & Wahyudin, A. (2019). *Methaphorical expresions in news discourses of Setya Novanto's graft case*. Antlantis Press. ICILLE 2018.
- Zamzani, Rahayu, Y.E., & Wahyudin, A. (2018). Deskripsi dan penyajian tokoh pada wacana berita kasus E-KTP dalam perspektif pers nasional. *Diksi*. Vol 29, no 1: Universitas Negeri Yogyakarta.